**Evaluasi SPBE,Kudus raih hasil baik.**

JAKARTA - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.Oleh karenanya,untuk mengetahui maturity level (tingkat kematangan) pelaksanaan SPBE atau yang dikenal dengan e-government di instansi pemerintah, Kementerian PANRB telah melaksanakan evaluasi SPBE yang kali pertama dilakukan pada tahun 2018. Pagi ini,dilangsungkan Penyerahan Hasil Penilaian Evaluasi SPBE tahun 2018,bertempat di hotel Bidakara Jakarta (28/3).Acara ini dihadiri para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Wakapolri, dan para Kapolda. Wabup Kudus HM Hartopo hadir pada kesempatan tersebut,didampingi oleh Kabag Organisasi.

Kabupaten Kudus berhasil meraih nilai indeks SPBE sebesar 2,72 (baik).Hasil ini cukup memuaskan, mengingat angka ini melebihi target pada RPJMD kab Kudus tahun 2018 sebesar 1,96.

Evaluasi SPBE dilakukan terhadap 616 instansi pusat, Polri, dan pemda. Evaluasi SPBE dilakukan untuk memotret kondisi faktual penerapan SPBE di instansi pusat dan pemda.

Tahapan evaluasi SPBE antara lain sosialisasi evaluasi SPBE, evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Untuk mendapatkan penilaian evaluasi SPBE yang objektif dan independen, Kementerian PANRB bekerja sama dengan lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyampaikan bahwa tujuan SPBE ini adalah untuk menyinkronkan semua infrastruktur yang sudah ada. K/L/pemda supaya terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah efektivitas dan efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan.